



Kontribusi Sistem Pendidikan Islam terhadap Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Politik di Indonesia

Achmad Diny Hidayatullah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: diny@uin-malang.ac.id

Abstract

Education is a basic human need. In Indonesia, the Islamic education system has made a significant contribution to social, economic, and political transformation. This is reflected in the increasing awareness of the community to send their children to madrasas and Islamic boarding schools and to practice religious teachings better. This reality shows that the Indonesian people, in various aspects of life, have felt the benefits of the Islamic education system. In the social, economic, and political realms, Islamic values have a significant influence even though they are not yet fully optimal. Islamic education, as the main instrument, is expected to be able to bring about meaningful changes in these three fields. Education is an essential asset in improving the quality of human resources so that the values and experiences of education based on Islam, individuals will continue to be inspired by Islamic values throughout their lives. Through the implementation of an Islamic-based economic system, a social system based on Islam, and a political system that breathes the spirit of Islamic values, successful social, economic, and political transformation in Indonesia can be realized. Universal Islamic values such as moderation, humanity, justice, deliberation, public benefit, unity, honesty, discipline, and tolerance are the basis for the development of various systems in Indonesia. If the Islamic education system is implemented well, it will be proven to make a unique contribution to the existing system. Friendly and loving Islam is the foundation of the social system in Indonesia.

Keywords: *Islamic Education; Transformation; Social; Economic; Political.*

Abstrak

Pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia. Di Indonesia, sistem pendidikan Islam telah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini tercermin dari meningkatnya kesadaran untuk memasukkan anak-anak ke pesantren, madrasah, serta menjalankan ajaran agama dengan lebih baik. Realitas ini menunjukkan bahwa manfaat sistem pendidikan Islam telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai Islam memberikan pengaruh yang penting meskipun belum sepenuhnya optimal. Pendidikan Islam, sebagai instrumen utama, diharapkan mampu membawa perubahan yang berarti dalam ketiga bidang ini. pendidikan adalah modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga nilai dan pengalaman pendidikan yang berlandaskan Islam, para individu akan terus terinspirasi oleh nilai-nilai islami sepanjang hidupnya. Melalui penerapan sistem ekonomi berbasis Islam, sistem sosial berlandaskan Islam, dan sistem politik yang bernafaskan semangat nilai-nilai Islam, keberhasilan transformasi sosial,

ekonomi, dan politik di Indonesia dapat terwujud. Nilai-nilai Islam yang universal seperti moderasi, kemanusiaan, keadilan, musyawarah, kemaslahatan umum, persatuan, kejujuran, disiplin, dan toleransi menjadi dasar pengembangan berbagai sistem di Indonesia. Jika sistem pendidikan Islam diterapkan dengan baik, terbukti memiliki kontribusi istimewa terhadap tatanan sistem yang ada. Islam yang ramah dan penuh kasih sayang menjadi landasan sistem sosial di Indonesia.

Kata-kata kunci: Pendidikan Islam; Transformasi; Sosial; Ekonomi; Politik.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah kunci. Manusia bagaikan sebuah entitas ‘kosong’ dan akan diisi oleh sesuatu, dan itu sangat tergantung dari ‘isinya’. Istilah tabularasa atau kertas putih, adalah fitrah setiap manusia yang lahir di dunia ini. Seorang bayi yang lahir, akan menjadi apa, siapa, bagaimana, sangat tergantung faktor inputnya, terutama faktor pendidikan. Maka benar sekali sabda nabi, bahwa mencari ilmu itu dari buaian ibu sampai liang lahat. Hal ini dikarenakan betapa pentingnya pendidikan untuk hidup dan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Pendidikan Islam, adalah pendidikan mengenai *Aqidah*, *Syariat*, dan *Tasawuf*. Hadits Jibril yang sangat mashur adalah bukti betapa pentingnya mempelajari dan mengamalkan tiga pondasi pendidikan Islam itu. Bicara sistem pendidikan Islam adalah terkait berbagai kebijakan, serangkaian usaha sadar agar tujuan-tujuannya tercapai. Hal ini adalah proses untuk mengatur kegiatan pendidikan berdasarkan ajaran agama Islam. Ini dilakukan dengan pendekatan sistemik dan mencakup berbagai tahapan mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Dan ada beberapa korelasi dalam kualitas pendidikan dan teknologi.¹

Dalam bahasa yang sederhana, Abdurrahman Mas’ud mengungkapkan bahwa sistem pendidikan Islam berusaha untuk mendidik anak-anak sehingga nilai-nilai spiritual dan etika Islam mempengaruhi cara mereka bertindak, berperilaku, dan melihat pengetahuan.² Dan usaha tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terukur, dengan tujuan mempersiapkan generasi berikutnya untuk menjalani dan memenuhi tujuan hidupnya dengan cara yang lebih efisien dan produktif.

Sistem pendidikan Islam di Indonesia berkembang semenjak ajaran Islam masuk di Indonesia. Pada mulanya, pendidikan Islam yang dijalankan adalah pendidikan yang belum tersistematis, masih informal, dan termotivasi sebagai bagian dari dakwah Islamiyah.

¹ Muzayyin Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

² Abdurrahman Mas’ud et al., *Paradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Semakin berkembangnya Islam di Indonesia, maka semakin banyak pula varian pendidikan Islamnya.³ Mulai dari pendidikan ala Rasullullah melalui sistem halaqah di masjid, sampai sistem yang paling modern melalui sekolah formal mulai level dasar sampai perguruan tinggi.

Perkembangan sistem pendidikan Islam tidak terlepas dari sistem sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Sejarah, misalnya, menunjukkan bahwa kebijakan politik melarang pendidikan Islam di pesantren untuk menjadi bagian “resmi” dari sistem pendidikan nasional pada masa lalu. Setelah “perjuangan”, pemerintah baru mengakui keberadaan pesantren sejak Tap MPR No. 2 tahun 1988 tentang “Asas Tunggal”, yang menetapkan bahwa “Pancasila adalah satu-satunya asas” untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, lembaga pendidikan keislaman seperti madrasah maupun pesantren, masuk ke dalam sistem pendidikan nasional secara hukum.⁴ Empat puluh tiga tahun pasca kemerdekaan, negara baru mengakui pesantren secara hukum menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Sebuah proses politik yang sangat menarik.

Selain itu, fakta bahwa madrasah didirikan sebagai tanggapan terhadap ketidakseimbangan antara pendidikan Islam tradisional dan pendidikan modern. Pada awal abad ke-20, madrasah muncul sebagai lembaga pendidikan Islam sebagai evolusi dari model pendidikan Islam khas Nusantara. Pada awal berkembangnya, merupakan sesuatu yang cukup progresif sehingga mampu mendobrak kemampuan pendidikan Islam yang jauh lebih mapan. Madrasah adalah hasil dari pembaharuan Islam di Indonesia yang terpengaruh dari pembaharuan di Timur Tengah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah studi pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, dan hubungan dalam perilaku sosial.⁵ Data dikumpulkan terdiri dari berbagai informasi seperti yaitu dari dokumen yang relevan seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada kemudian dianalisis menjadi temuan penelitian.⁶ Dengan mengumpulkan data dari lingkungan alami, penelitian kualitatif

³ Moh. In’ami, “Pendidikan Islam: Memayu Hayuning Bawono,” *At-Ta’dib: Jurnal of Pesantren Education* 4, no. 1 (2009): 115–127, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/view/576>.

⁴ Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan* (Bandung: Nuansa, 2003).

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).

⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003).

bertujuan untuk mengungkapkan fenomena secara menyeluruh dan kontekstual. Peneliti digunakan sebagai alat utama.⁷ Beberapa data kemudian dicermati secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hasilnya memuaskan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif.⁸ Data dari jurnal dan buku tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia kemudian dikombinasikan dengan kontribusinya terhadap transformasi sistem-sistem yang ada: sosial, ekonomi, dan politik. Data yang ada digunakan sebagai sarana untuk melihat isi teks dan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam menyajikan data, peneliti menyajikan hasil diskusi dengan menggunakan teks naratif. Data narasi terdiri dari beberapa kalimat dan paragraf yang tersusun. Setelah itu peneliti menginterpretasikan data dengan menggunakan teori analisis teks. Pada tahap akhir, peneliti mensintesis ringkasan hasil penelitian yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pendidikan Islam di Indonesia

“Sistem” berasal dari kata Yunani “*sistema*”, yang berarti suatu keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian. Sistem juga dapat disebut sebagai cara, tata kelola, rencana, skema, prosedur, atau metode, dan memiliki mekanisme yang berpola dan konsisten, bahkan seringkali otomatis. Seluruh sistem terdiri dari berbagai subsistem yang saling berhubungan dan memiliki peran, tugas, dan kedudukannya sendiri. Namun, cara peran dan kedudukannya terhubung ke seluruh sistem menentukan seberapa baik tujuan dapat dicapai.⁹

Proses membina dan mengembangkan kesadaran diri seseorang di dalam suatu bangsa atau negara dikenal sebagai pendidikan. Dengan mengembangkan kesadaran ini, bangsa tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan kekayaan pemikiran dan budaya mereka kepada generasi berikutnya. Pada gilirannya, akan memberikan inspirasi bagi mereka dalam setiap aspek kehidupannya.¹⁰ Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Esensi pendidikan adalah benar-benar mendidik orang untuk menjadi orang yang berbudaya secara fisik, mental, dan moral.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

⁸ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran*, Edisi 4. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2016).

⁹ Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012).

¹⁰ Azyumardi Azra, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998).

Dalam Al-Quran, pendidikan bisa memiliki dua prespektif, yaitu pendidikan adalah: 1) hikmah, ilmu, dan pengajaran sebagaimana dalam Q.S. Ali Imran: 79, dan 2) penjagaan sebagaimana dalam Q.S. al-Isra: 24 dan Q.S. as-Syu'ara: 18.

Pendidikan Islam mengacu pada pendidikan manusia secara keseluruhan, termasuk akal dan hati, fisik dan rohani, akhlak, dan keterampilan. Konsekuensinya adalah mempersiapkan manusia untuk hidup, baik dalam konflik maupun dalam keadaan damai, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi masyarakat dengan segala keburukan dan keburukannya, baik dalam situasi yang menyenangkan maupun yang buruk.¹¹

Pendidikan Islam bukan sekadar pendidikan fisik, tapi juga rohani yang didasarkan pada hukum agama Islam untuk membangun kepribadian utama menurut standar Islam.¹² Sistem pendidikan Islam adalah upaya untuk mengorganisasikan proses kegiatan pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Ini didasarkan pada pendekatan sistemik yang terdiri atas berbagai jenjang jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, kualitas akhlak serta akademik.¹³

Pendidikan Islam terdiri atas sumber-sumber ajaran Islam: Iman, Islam, dan Ihsan. Mereka digunakan secara efektif dan teratur untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yaitu mempersiapkan generasi mendatang sebagai manusia yang sempurna jasmani rohani, iman dan taqwa, cerdas dan terdidik, berbudaya dan berpandangan luas.¹⁴ Terbentuknya manusia paripurna, yaitu manusia yang menyembah kepada Allah (sebagai '*abdullāh*'), dan bertugas sebagai wakil Allah di bumi untuk melestarikan serta memakmurkannya (sebagai *khalīfatullāh fi al-ard*). Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat elemen pendidikan yang berfokus pada ajaran Islam yang saling berhubungan dan bergabung untuk mencapai tujuan bersama.¹⁵

Sistem pendidikan Islam di Indonesia memiliki ciri khas yang belum tentu terdapat di negara lain. Ciri itu, selain terlembaga dengan baik juga memiliki ragam keunikan masing-masing. Haidar Putra Daulay menyatakan bahwa sistem pendidikan Islam di Indonesia secara spesifik diwakili lembaga-lembaga keIslaman sebagai berikut: Madrasah, Pesantren,

¹¹ Yusuf Al. Qardawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

¹² Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980).

¹³ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*.

¹⁴ Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

¹⁵ Muhammad Aulia Rahman, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Intermasa, 2002).

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang terdiri atas Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, maupun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Juga terdapat lembaga-lembaga swasta seperti madrasah swasta maupun Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Dan tidak lupa ada lembaga pendidikan non formal, seperti madrasah diniyah, majelis taklim, maupun taman pendidikan Al-Quran.¹⁶

Hasil riset mengungkapkan bahwa PTKIN di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma dalam pengelolaannya, terutama kampus yang berubah menjadi Universitas Islam Negeri. Mayoritas UIN berubah status menjadi Badan Layanan Umum. Mereka fokus pada pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bisnis utama mereka dan harus mengelola aset secara profesional dan bernilai ekonomi sebagai potensi pendapatan. Walaupun faktanya, UIN yang berstatus BLU masih mengelola aset secara normatif dan konservatif. Hal karena belum sepenuhnya melakukan transformasi manajemen universitas. Tuntutan agar UIN berstatus BLU bertransformasi dari lembaga pemerintah menjadi sistem “*agencification*” dan semi otonom seiring dengan pendelegasian pengelolaan kekayaan negara dari pemerintah pusat.¹⁷

Sumber pendidikan Islam berbeda dengan sumber pendidikan yang lain. Karena landasan teologis dalam pengambilan sumber pendidikan Islam sangatlah dominan, bisa jadi mutlak. Islam sebagai agama dan pandangan hidup, sudah menyiapkan serangkaian instrumen untuk manusia agar bisa merumuskan tujuan pendidikannya. Sumber pendidikan Islam yaitu: 1) Al-Quran; 2) Al-hadis; 3) Perkataan Sahabat Nabi; 4) Kemaslahatan umum; 5) Adat istiadat, nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan sosial; 6) Hasil pemikiran-pemikiran dalam khazanah keislaman.¹⁸

Sistem Sosial di Indonesia

Sistem sosial terdiri dari berbagai subsistem masyarakat yang berinteraksi satu sama lain. Pada gilirannya subsistem itu membentuk kehidupan secara bersama-sama untuk mencapai cita-cita serta tujuan tertentu. Sosial berasal dari kata “*society*”, yang memiliki arti masyarakat. Sosial artinya hidup secara bersama-sama, sebagai lawan dari individual, yang berarti hidup secara sendiri-sendiri.¹⁹

¹⁶ Haidar Putra Dauly, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

¹⁷ Slamet, Achmad Diny Hidayatullah, dan Imam Bani Mustolik, “The Importance of System Transition in The Transfer of State Assets Management to Public Institutions: Analysis at The State Islamic University - Public Service Agency in Indonesia,” *IJIRME: International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Education* 3, no. 5 (2024): 743–752, <https://ijirme.com/v3i5/8.php>.

¹⁸ Azra, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*.

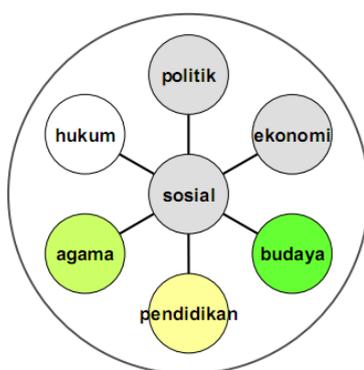
¹⁹ Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*.

Para pakar menekankan konsep tentang sistem sosial yakni mengenai hubungan antara manusia dan satu sama lain, manusia dan masyarakat, dan masyarakat dan masyarakat. Hampir selalu, hubungan ini terjadi dalam suatu satuan atau organisasi. Sebagai sebuah satuan yang bersistem dan selalu berinteraksi sehingga berakibat setiap (satuan) masyarakat mewujudkan dalam satu adalah sistem sosial.²⁰

Sosiolog Amerika, Talcott Parsons, yang menginisiasi teori sistem sosial. Sebagai pengganti konsep eksistensial perilaku sosial, konsep relasional digunakan untuk menggambarkan sistem sosial.²¹ Setiap masyarakat, kelompok, atau organisasi sosial adalah suatu sistem sosial, tidak peduli di mana ia berada. Sistem sosial dapat dipahami sebagai suatu hubungan dari interaksi-interaksi sosial yang ada dan tumbuh dalam masyarakat tertentu, sebagai sarana untuk saling berinteraksi dalam masyarakat tersebut. Sistem sosial dapat memiliki banyak subsistem dan berfungsi dengan cara yang sangat beragam. Sistem sosial berfungsi sebagai wadah hubungan antara individu dan kelompoknya dan antara individu dan kelompok lain, untuk memenuhi kebutuhan mereka, mempertahankan, dan mengembangkan hidup mereka sesuai dengan peran mereka.

Baik individu maupun kelompok manusia memiliki batas dan ikatan kewilayahan, serta komponen kebudayaan, seperti organisasi sosial, dan peraturan tertulis maupun tak tertulis. Oleh karena itu, sistem sosial dapat didefinisikan sebagai kumpulan subsistem yang ada dalam masyarakat yang saling bergantung, membutuhkan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Gambaran sistem sosial dalam kaitannya dalam sistem-sistem yang ada, baik sistem ilmu pengetahuan dan, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun agama, sebagaimana diagram berikut:



²⁰ Nurdien H. Kistanto, "Sistem Sosial-Budaya di Indonesia," *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 3, no. 2 (2008): 1–16, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13221>.

²¹ Rodiyah, "Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Perspektif Socio-Legal," *Masalah-masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 144–152, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4214>.

Struktur sistem sosial terdiri dari satuan-satuan interaksi sosial yang membentuk sistem sosial itu sendiri. Menurut Alvin L. Bertrand, sistem sosial terdiri atas minimal sepuluh komponen, yaitu: 1) Pengetahuan; 2) Perasaan; 3) Cita-Cita, Sasaran, atau Tujuan; 4) Norma; 5) Status atau Kedudukan Peranan; 6) *Rank* atau Tingkatan (pangkat); 7) *Power* atau Kekuasaan (pengaruh); 8) Sanksi; 9) Fasilitas atau Sarana; dan 10) Tekanan ketegangan (*stress-strain*).²²

Sistem sosial bangsa Indonesia, secara umum terdiri atas: 1) Pancasila sebagai dasar negara; 2) Undang-Undang Dasar 1945; 3) Indonesia sebagai nama negara atau bangsa; 4) Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan nasional; 5) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 6) Garuda Pancasila; dan 7) *Bhinneka Tunggal Ika*.²³

Sistem Ekonomi di Indonesia

Menurut para ahli, sistem ekonomi terdiri dari seperangkat mekanisme dan organisasi yang digunakan untuk membuat dan menerapkan keputusan tentang produksi, pendapatan, dan konsumsi pada suatu wilayah tertentu.²⁴ Sistem ekonomi terdiri dari kumpulan berbagai institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana sumber daya ekonomi digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Institusi-institusi ini juga mengatur bagaimana membuat keputusan tentang hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi serta bagaimana sumber daya ekonomi dimanaj agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Diantara definisi tentang sistem ekonomi dapat dikemukakan oleh Theodore Morgan mendefinisikan tentang sistem ekonomi. Katanya: *each economic system can only be comprehended as a component of the constellation of political, social, and economic institutions and ideas that it is a part of*.²⁵

Secara umum, sistem ekonomi terdiri atas tiga varian: Ekonomi Pasar atau Ekonomi Kapitalis (ekonomi berbasis perusahaan pribadi), Ekonomi Terpusat atau Ekonomi Komando (ekonomi terpusat yang direncanakan dan diatur secara menyeluruh oleh

²² Nerisa Sertiawan, Ayu Lestari Nasution, dan Ade Chia Syafira, "Konsep Dasar Sistem Sosial Indonesia dan Masyarakat sebagai Suatu Sistem," *Jurnal Faidatuna* 4, no. 2 (2023): 123–134, <https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/ft/article/view/223>.

²³ Kistanto, "Sistem Sosial-Budaya di Indonesia."

²⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).

²⁵ Bambang Purwanto, *Peasant Economy and Institutional Changes in Late Colonial Indonesia*, International Conference on Economic Growth and Institutional Change in Indonesia in the 19th and 20th Centuries (Amsterdam, 2002), [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rowlandpasaribu.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/09/bambang-purwanto-peasant-economy-and-institutional-changes-in-late-colonial-indonesia.pdf](https://rowlandpasaribu.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/09/bambang-purwanto-peasant-economy-and-institutional-changes-in-late-colonial-indonesia.pdf).

pemerintah), dan Ekonomi Campuran.²⁶ Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yang menggabungkan elemen sistem ekonomi berbasis mekanisme pasar dan elemen sistem ekonomi terpusat yang diatur oleh negara.²⁷

Di seluruh dunia, ada tiga jenis sistem ekonomi: kapitalis, liberal, dan sosialis. Indonesia juga memiliki sistem ekonomi Pancasila, yang dibangun selama periode reformasi. Namun, sistem ini lebih condong ke arah kapitalistik dengan ideologi liberal yang disesuaikan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ekonomi Islam sedang berkembang, dan usaha syariah semakin meningkat.

Karena sistem perekonomian beroperasi berdasarkan mekanisme pasar, sistem mekanisme pasar merupakan komponen yang sangat penting dari sistem ekonomi nasional. Namun, sistem ekonomi pasar tidak boleh berfokus pada liberalisme bebas atau *free fight liberalism* yang mengeksploitasi orang miskin dan lemah serta mencegah penguasaan ekonomi oleh kelompok tertentu. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi. Negara hanya dapat berperan sebagai stabilisator, dinamisator, dan regulator ekonomi. Kekuasaan negara dibatasi. Kekuasaan tersebut diberikan dengan syarat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran rakyat, meskipun negara memiliki otoritas atas cabang-cabang produksi utama dan hajat hidup rakyat. Dalam situasi ini, negara berperan lebih mirip untuk melaksanakan keadilan sosial daripada menguasai sektor produksi.²⁸

Bangunan Sistem Ekonomi Indonesia



²⁶ Christopher Pass, Bryan Lowes, dan Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1994).

²⁷ Gregory Gorssman, *Sistem-sistem Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

²⁸ Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan, "Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi, dan Sistem Ekonomi Kerakyatan," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 21, no. 3 (2005): 430–440, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/186/0>.

Sistem ekonomi terdiri dari empat bagian: 1) Sumber daya, yang memberikan sumber daya kepada aktor atau pelaku untuk melakukan aktivitas; 2) Pelaku dan regulasi, yang membuat sistem ekonomi nyata; 3) Mekanisme, yang membantu menyelenggarakan kegiatan ekonomi; dan 4) Kesejahteraan Umum, yang berfungsi sebagai referensi atau tujuan dari semua bagian sistem ekonomi.²⁹

Sistem Politik di Indonesia

Salah satu pakar ilmu politik, David Easton, mengemukakan tentang bangunan ilmu politik secara terstruktur dalam dua tahap. Pertama, ia menulis “*The Political System*”, di mana dinyatakan bahwa ilmu politik membutuhkan teori umum. Pada tahap kedua, ia memperkenalkan dan mencari konsep yang mendukung karya sebelumnya dalam karya lainnya, seperti “*A System Analysis of Political Life*” serta “*A Framework for Political Analysis*.” Setelah itu, ia mencoba membangun kerangka ilmu politik secara holistik.³⁰

Dalam hal ini, Easton telah menciptakan struktur pemikiran utama yang digunakan untuk menyelidiki sistem politik. Karena fleksibilitas dan fleksibilitasnya, kerangka pikir Easton dapat digunakan dalam berbagai struktur sosial dan politik. Dalam menjelaskan fenomena sistem politik, para pengguna teori Easton dapat digunakan dan dikembangkan (improvisasi). Menurut Easton, politik bisa didefinisikan sebagai proses otoritas pembagian nilai masyarakat. Penafsiran ini menandai dua hal dalam pembentukan teori sistem politik. Proses politik dimulai dengan mempertimbangkan nilai sebagai barang yang dinegosiasikan dalam masyarakat. Namun, lembaga masyarakat yang memiliki otoritas untuk melakukan proses pembagian nilai ini.

Secara lebih praktis, definisi tentang sistem politik terdiri dari tiga aspek. Pertama, sistem politik dimana nilai-nilai ditentukan melalui kebijakan yang diterapkan, baik melalui kewenangan maupun paksaan. Kedua, penetapan nilai dengan kewenangan yang bersifat paksaan. Ketiga, penetapan tersebut akan berdampak pada keterikatan nilai-nilai tersebut terhadap masyarakat secara menyeluruh.³¹

Didasarkan pada konsep tersebut, bisa disimpulkan bahwa sistem politik terdiri atas beberapa komponen berikut. Pertama, pola yang konsisten dari hubungan antarmanusia yang ada di berbagai badan politik. Hubungan ini terdiri atas infrastruktur politik (partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik) dan

²⁹ Naelul Azmi, “Problematika Sistem Ekonomi Islam di Indonesia,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 44–64, <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/186>.

³⁰ David Easton, *The Political System* (New York: Alfred A. Knopf, 1967).

³¹ Sukarna, *Sistem Politik* (Bandung: Alumni, 1977).

suprastruktur politik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Kedua, kebijakan yang melibatkan pembagian atau pembagian barang yang wujud dan nir-wujud untuk memastikan keamanan. Dengan kata lain, membagi kekuasaan sesuai dengan nilai-nilai bernegara. Ketiga, penggunaan kekuatan fisik yang sah untuk melakukan paksaan. Keempat, fungsi adaptasi dan asimilasi terhadap rakyat.³²

Sistem politik terdiri dari beberapa subsistem, menurut formulasi lain. Pertama, ada subsistem masukan (*input*), yang mencakup sumber-sumber, tuntutan, dan dukungan. Kedua, subsistem proses (*withinput*). Proses ini mencakup mengubah masukan menjadi keluaran, juga dikenal sebagai proses konversi. Ketiga, subsistem keluaran (*output*). Keluaran ini adalah produk atau hasil dari proses konversi, seperti keputusan atau kebijakan. Subsistem lingkungan (*environment*) adalah bagian dari subsistem keluaran.

Sistem politik yang berlaku di Indonesia saat ini adalah bagian dari proses demokratisasi. Pasca reformasi hasil dari pendewasaan kita dalam berdemokrasi berdampak pada banyak aspek dibidang politik. Hal ini tergambar seperti dalam pemilihan langsung presiden, sistem *trias politika* (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan berbagai tugas dan kewenangannya, Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, mekanisme pembatasan perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden; proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden; larangan Presiden untuk membubarkan DPR; perubahan atau pemulihan eksistensi MPR; dan pembentukan sistem *judicial review* atau pengujian undang-undang.³³

Falsafah Negara adalah faktor yang berpengaruh terhadap sistem politik Indonesia. Hal tersebut menjadikan bangsa Indonesia memiliki nilai yang akan bertahan sepanjang masa. Walaupun dalam banyak hal bersifat *transcendental*, dampaknya terhadap sistem politik Indonesia cukup terasa. Sistem politik berlandaskan Pancasila menjadikan negara Indonesia tidak masuk pada blok liberal maupun sosial. Kemudian dapat dijelaskan bahwa lingkungan akan mempengaruhi sistem politik Indonesia. Setiap sistem, termasuk sistem politik, harus secara terbuka menerima pengaruh lingkungannya dan juga dapat mengubahnya.³⁴

³² Endang Komara, "Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi," *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (2015): 117–124, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK/article/view/2814>.

³³ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

³⁴ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004).

Dengan sistem politik Indonesiasaat ini, tujuan kita sebagai bangsa dan negara adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama secara keseluruhan daripada hanya menguntungkan kelompok atau golongan tertentu, terlebih lagi individu-individu tertentu yang memegang kekuasaan. Tidak peduli budaya politik apa yang dianut oleh para politisi, yang paling penting adalah mereka harus tetap dekat dengan kebutuhan dan hal-hal penting yang dirasakan oleh rakyat. Budaya politik kita semakin dewasa dan membaik melalui pemilihan umum yang damai, pilkada yang lancar, dan semakin sedikit konflik politik di masyarakat. Kondisi ini akan membantu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan yang terpilih.

Kontribusi Sistem Pendidikan Islam terhadap Transformasi Sistem Sosial, Ekonomi, dan Politik

Sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem pendidikan adalah empat entitas yang tidak sama. Masing-masing memiliki konsep dan definisi yang mandiri. Walaupun begitu, antar sistem tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat. Secara umum bisa ditarik garis merahnya, bahwa sistem pendidikan di Indonesia memiliki kontribusi yang erat dan pengaruh yang kuat terhadap sistem sosial, ekonomi, dan politik. Jadi, kita lihat sistem pendidikan Islam yang ada sekarang, adalah sebuah proses yang panjang, hasil interaksi dan proses saling mempengaruhi dari berbagai sistem yang berkembang di Indonesia.

Pendidikan adalah kebutuhan paling dasar dan asasi setiap manusia. Pendidikan yang hanya diberikan hanya kepada manusia saja, merupakan pengejawantahan tugas manusia utama di bumi ini. Sebagai *'abdullah* dan *khalīfatullāh*. Bekal pendidikan Islam yang baik pada gilirannya akan melahirkan sistem-sistem sosial, ekonomi, maupun politik yang baik.

Integrasi dari sistem pendidikan Islam dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, pada saat ini mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Hal ini bisa dibuktikan dari banyaknya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah, dipondokkan di pesantren, bermunculannya SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) yang banyak muatan agama dalam mata pelajarannya, maupun berusaha melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Saat ini tidak kesulitan menemukan wanita yang menutup aurat di berbagai bidang profesi. Yang terbaru profesi polisi wanita sudah bisa menggunakan jibab dalam segala aktivitasnya sesuai dengan keyakinannya.

Internalisasi nilai-nilai Islam yang ditanamkan pada pendidikan Islam sejak dini, juga mengalami perkembangan yang signifikan. Bermunculan berbagai lembaga pendidikan Al-Quran, seperti TPQ/TPA, berbagai metode belajar baca Al-Quran yang lebih efektif efisien, seperti Qiraati, Tartila, Yanbu'a, Ummi, Albarqy, dan lain sebagainya. Pun lembaga maupun

pesantren yang menfokuskan pada tahfidz Al-Quran juga semakin tumbuh berkembang. Yusuf Mansur dengan Darul Quran dan Rumah Tahfidz-nya melalui program Program Pembibitan Penghafal Al-Quran (PPPA) berkembang hampir di seluruh Indonesia.

Dalam bidang ekonomi, menjamurnya berbagai usaha yang berbasis syariah, bukti bahwa pendidikan Islam sudah sampai pada level sistem ekonomi, yang pada gilirannya kita kenal dengan ekonomi syariah. Kita kenal yang menjadi pioner adalah Bank Syariah. Kemudian muncul asuransi syariah, pegadaian syariah, *baitul mal wat tanwir*, reksadana syariah, leasing syariah. Prinsip-prinsip agama Islam seperti berikut: sumber daya dianggap sebagai titipan Allah kepada manusia; kepemilikan diakui dalam batas-batas tertentu sesuai kewajiban; prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah *ta'awun* atau kerja sama; ekonomi syariah mencegah bertumpuknya kekayaan yang dikuasai oleh sedikit orang saja; ekonomi syariah memberikan jaminan bahwa kekayaan masyarakat dimiliki dan digunakan secara teratur untuk kepentingan masyarakat secara umum; dan seorang muslim dilarang menjalankan sistem *ribawi* dengan segala derivasinya.³⁵

Zaman yang semakin maju mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran yang tinggi terhadap implementasi nilai-nilai agama dalam berbagai bidang. Banyak elemen kehidupan di masyarakat yang merasakan perubahan ini, termasuk sektor perekonomian. Menggambarkan tren tersebut, kehadiran bank syariah yang tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia mencerminkan tumbuh pesatnya ekonomi syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, hingga tahun 2021, terdapat lebih dari tiga puluh empat usaha perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil riset, tersajikan bahwa pembiayaan ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam perspektif Islam bisa meningkatkan perekonomian umat secara lebih berkeadilan dan berkelanjutan.³⁶ Bank syariah memberikan pembiayaan sesuai dengan landasan Islam serta memberikan layanan perbankan seperti investasi dan asuransi Islam yang terbebas dari transaksi *ribawi*.

Pada sistem ekonomi Indonesia hari ini, prinsip ekonomi syariah juga mengalami perkembangan yang menggembirakan. Sebagai contoh dalam penerapan akad *wakalah* pada *financial technology* dengan metode *peer to peer lending* di Indonesia dimana beberapa

³⁵ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

³⁶ Nada Rakhima Salsabila, Nur Syafiqah Hussin, dan Achmad Diny Hidayatullah, "Bank Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan untuk Meningkatkan Ekonomi Umat," *Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 96–114, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/9144>.

perusahaan menyediakan produk pembiayaan berdasarkan akad *wakalah bil ujah* yang sesuai dengan ketentuan syariah.³⁷

Inspirasi nilai-nilai Islam juga berkembang dalam perekonomian Islam di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kesadaran beberapa pelaku ekonomi, para entrepreneur untuk “hijrah”, meninggalkan ‘keharaman bunga bank’ yang *ribawi* menuju akad yang *syar’i*. Halal dan barakah. Ekonomi Islam tercermin, pertama dalam sistemnya yang menyeluruh. Kalau ekonomi konvensional (ciptaan manusia) sering kali berpisah sama sekali dengan agama, maka ekonomi Islam bertalian erat dengan agama, *aqidah* dan *syari’at*. Ciri-cirinya: 1) Aktivitas ekonomi Islam memiliki ciri-ciri ibadah; 2) Aktivitas ekonomi Islam mempunyai tujuan yang mulia; 3) Pengawasan mengamalkan aktivitas ekonomi Islam memiliki pengawasan melekat (diri sendiri).

Cermin ekonomi Islam kedua adalah bahwa ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kemaslahatan masyarakat. Ekonomi Islam tidak hanya bergantung pada individu seperti hanya ekonomi kapitalis, dan juga tidak pada masyarakat (negara) saja seperti ekonomi sosialis. Akan tetapi kebijaksanaannya berdasarkan kedua kepentingan itu sekaligus, dan berusaha menciptakan keseimbangan keduanya. Dengan kata lain, ekonomi Islam mengakui kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat selama tidak bertentangan satu sama lain, dan bisa diambil sintesa antar keduanya. Islam mengakui hak milik kolektif dan pribadi. Dan apabila ada pertentangan antara kepentingan individu dan masyarakat, maka kepentingan dan kemaslahatan masyarakat harus lebih didahulukan.³⁸

Akan tetapi, reformasi memiliki dampak besar terhadap falsafah ekonomi Indonesia. Krisis moneter yang membuat Indonesia menjadi hampir terpuruk, menyebabkan Indonesia menyerah pada penguasa global saat ini: ekonomi liberal. Amandemen sampai ke empat UUD 1945 menyebabkan Indonesia justru menjauh dari cita-cita ekonomi Pancasila. Walaupun banyak UU yang lahir pasca reformasi yang menjauh dari cita-cita mulia sistem perekonomian Pancasila, akan tetapi Indonesia pernah mencatat seorang santri, produk asli pendidikan Islam ala Indonesia, terutama pesantren dan madrasah memimpin negeri ini dengan gemilang, ialah Almarhum Dr. (HC) KH. Abdurrahman Wahid atau lebih di kenal Gus Dur.

³⁷ Nazhira Mustaqilla dan Achmad Diny Hidayatullah, “Implementasi Akad Wakalah pada Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending di Indonesia,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2022): 236–247, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/15000>.

³⁸ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1987).

Hal ini diakui oleh pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, Prof. Rhenald Kasali, sosok Gus Dur membawa perubahan ekonomi, sosial, dan politik yang luar biasa pada era kepemimpinannya. Dua tahun beliau memimpin (1999-2000), ada kurang lebih sepuluh perubahan besar yang beliau lakukan, seperti mengamandemen Tap MPRS No XXIX/MPRS/1966, yang melarang ajaran Marxisme-Leninisme, melikuidasi dua kementerian (Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan), mengubah nama Irian menjadi Papua, menghapus pelarangan praktik budaya dan tradisi Tiongkok. Beliau juga mereformasi TNI, menciptakan Kementerian HAM, menggilir posisi panglima dari sebelumnya hanya satu matra diganti dengan cara bergiliran (AD, AL, dan AU), serta menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional.³⁹

Hubungan sistem pendidikan Islam dengan sistem politik di Indonesia, secara realita tidak terlalu banyak mengalami perkembangan yang menggembirakan. Walaupun ada beberapa partai yang berasaskan atau berfilosofi Islam, akan tetapi bukan jaminan nilai-nilai Islam mampu dilaksanakan secara baik dan benar. Partai politik sebagai instrumen terpenting dalam sistem politik, agaknya masih sangat jauh dari inspirasi agama dalam fatsun politiknya. Banyak hal yang bisa membuktikan hal itu, seperti kasus korupsi kepala daerah, anggota DPR, maupun pengusaha yang berafiliasi dengan partai atau oknum partai. Jabatan publik diatas mayoritas di isi oleh orang partai politik. Beberapa tahun ini ada banyak peristiwa terkait korupsi yang diproses di KPK.⁴⁰ Banyak kepala daerah seperti: Gubernur Bengkulu, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Papua, Bupati Pamekasan, Wali Kota Tegal, Bupati Batubara, Wali Kota Batu, Wali Kota Malang, Bupati Malang, Bupati Klaten, Wali Kota Cilegon, dan yang terbaru Bupati Sidoarjo.⁴¹

Idealnya pendidikan Islam bisa memberikan jawaban atas sistem politik yang Islami. Yang berasaskan nilai-nilai Islam, sesuai yang digariskan dalam Al-Quran dan hadits. Pandangan hidup (*weltanschauung*) seperti *ummatan wahidatan* (Q.S Al-Anbiya: 92), orang mukmin adalah bersaudara yang saling mencintai karena Allah, nasihat-menasihati, berbuat keadilan, dan sabar (Q.S Al-Balad: 17, Q.S Al-Asr: 3), masing-masing berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak boleh bercerai berai (Q.S Ali Imran: 103), mengajak kepada kebaikan dan melarang perbuatan keji dan mungkar (Q.S Ali Imran: 104), dan puncaknya

³⁹ Rhenald Kasali, "Sepuluh Tahun, Dua Perubahan," *Kompas.com*, last modified 2013, <https://nasional.kompas.com/read/2013/06/19/08483863/Sepuluh.Tahun..Dua.Perubahan>.

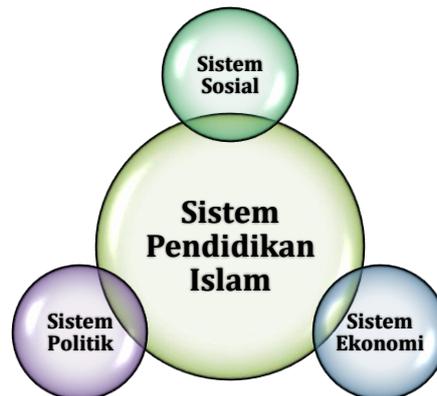
⁴⁰ Statistik, "TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan," *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi*, last modified 2024, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.

⁴¹ Umar Mukhtar, "Setahun Terakhir, Ini Dia 11 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK," *Republika Online*, last modified 2017, <https://news.republika.co.id/berita/owi9vz384/setahun-terakhir-ini-dia-11-kepala-daerah-yang-terjaring-ott-kpk>.

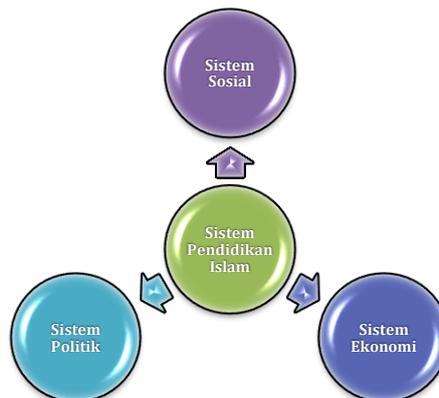
adalah mentaati Allah dan Rasulnya, serta ulil amri yang telah diangkat (Q.S An-Nisa: 49).⁴² Itulah relevansi nilai-nilai Islam yang bisa diterapkan dalam berpolitik. Muslim pada gilirannya mampu menjadi *da'i* yang bisa mengajak orang-orang lain agar berperilaku sesuai ajaran Islam, dengan memberikan teladan akhlak Islami. Mampu mengajak orang-orang lain kepada Islam dan berusaha mewujudkan ummah di lingkungannya.

Melihat realita di atas, bisa difahami bahwa sistem pendidikan Islam secara umum sudah tersebar di masyarakat. Sudah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Walaupun di sana sini masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan sebagai tanggung jawab bersama. Dalam bidang sosial, bidang ekonomi, maupun politik inspirasi nilai-nilai agama sudah memberikan pengaruh yang signifikan, walaupun belum bisa dikatakan maksimal. Transformasi sosial, ekonomi, dan politik selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Sehingga tatanan sistem yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman menjadikan Indonesia menjadi lebih baik, aman, dan damai.

Gambaran pola hubungan awal sistem pendidikan Islam yang pada gilirannya bisa menginspirasi sistem-sistem yang lain di Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambaran pola hubungan selanjutnya yang mana sistem sosial, ekonomi, dan politik juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem pendidikan Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:



⁴² Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*.

KESIMPULAN

Agama Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam ini terwujud dalam berbagai sendi kehidupan. Terutama pada bidang pendidikan. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun berbicara tentang pendidikan. Sehingga pendidikan dalam Islam mendapatkan tempat yang sangat istimewa. Allah mengangkat derajat seseorang apabila seorang hamba itu beriman dan berilmu. Pendidikan Islam adalah upaya sadar manusia untuk menjalankan misi sebagai ‘*abdullah* dan *khalīfatullāh*. Pendidikan Islam adalah sarana untuk mencapai tujuan utama seorang Muslim yaitu beribadah kepada Allah, bertaqwa, dan tidak mati kecuali dalam keadaan membawa iman dan Islam. Dan tujuan ini selaras dengan tujuan hidup dalam Islam.

Islam sebagai inspirasi, juga memberikan porsi yang besar pada tatanan kehidupan pribadi dan sosial manusia. Dimana pendidikan Islam sebagai instrumennya, diharapkan mampu memberikan perubahan yang signifikan pada sistem sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Nilai-nilai Islam yang universal seperti kemanusiaan, keadilan, kedamaian, musyawarah, kemaslahatan umum, persatuan, kejujuran, disiplin, toleransi, berani karena benar, dan lain sebagainya.

Apabila sistem pendidikan Islam dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidahnya, maka hasilnya akan sangat berpengaruh terhadap tatanan sistem yang ada, seperti sistem sosial, ekonomi, dan politik. Karena pendidikan adalah investasi manusia. Ia akan menanamkan serangkaian nilai dan pengalaman hidup. Jika nilai-nilai dan pengalaman itu sesuai dengan Islam, maka sepanjang hidup manusia pembelajar tersebut akan terinspirasi oleh nilai-nilai islami. Pada gilirannya akan mencapai tujuan utama pendidikan menciptakan manusia seutuhnya, lahir batin, fisik psikis, dunia akhirat, sehat jasmani rohani, dengan Allah SWT sebagai tujuan pertama dan utamanya.

Dengan menjalankan sistem ekonomi berbasis Islam, sistem sosial berlandaskan Islam, dan sistem politik bernafaskan semangat nilai-nilai keislaman, maka disitulah keberhasilan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Islam ramah dan rahmah menjadi soko guru peradaban Islam ala Indonesia. Islam *rahmatan lil ‘alamin*.

REFERENSI

- Abbas, Tarmizi, dan Win Konadi Manan. “Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi, dan Sistem Ekonomi Kerakyatan.” *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 21, no. 3 (2005): 430–440. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/186/0>.
- Anto, M.B. Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

- Arifin, Muzayyin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Azmi, Naelul. "Problematika Sistem Ekonomi Islam di Indonesia." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 44–64. <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/186>.
- Azra, Azyumardi. *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran*. Edisi 4. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2016.
- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Easton, David. *The Political System*. New York: Alfred A. Knopf, 1967.
- Feisal, Jusuf Amir. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Gorssman, Gregory. *Sistem-sistem Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- In'ami, Moh. "Pendidikan Islam: Memayu Hayuning Bawono." *At-Ta'dib: Jurnal of Pesantren Education* 4, no. 1 (2009): 115–127. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/view/576>.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Kasali, Rhenald. "Sepuluh Tahun, Dua Perubahan." *Kompas.com*. Last modified 2013. <https://nasional.kompas.com/read/2013/06/19/08483863/Sepuluh.Tahun..Dua.Perubahan>.
- Kistanto, Nurdien H. "Sistem Sosial-Budaya di Indonesia." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 3, no. 2 (2008): 1–16. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13221>.
- Komara, Endang. "Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi." *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (2015): 117–124. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK/article/view/2814>.
- Langgulong, Hasan. *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Alhusna, 1987.
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Mas'ud, Abdurrachman, Abdul Kholiq, Karnadi Hasan, Lift Anis Ma'shumah, Mahfudhz Junaidi, Ahmad Muthohar, Abdul Wahid, et al. *Paradigma Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhaimin. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*. Bandung: Nuansa, 2003.
- Mukhtar, Umar. "Setahun Terakhir, Ini Dia 11 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK." *Republika Online*. Last modified 2017. <https://news.republika.co.id/berita/owi9vz384/setahun-terakhir-ini-dia-11-kepala-daerah-yang-terjaring-ott-kpk>.

- Mustaqilla, Nazhira, dan Achmad Diny Hidayatullah. "Implementasi Akad Wakalah pada Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending di Indonesia." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2022): 236–247. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/15000>.
- Pass, Christopher, Bryan Lowes, dan Leslie Davies. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1994.
- Purwanto, Bambang. *Peasant Economy and Institutional Changes in Late Colonial Indonesia*. International Conference on Economic Growth and Institutional Change in Indonesia in the 19th and 20th Centuries. Amsterdam, 2002. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rowlandpasaribu.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/09/bambang-purwanto-peasant-economy-and-institutional-changes-in-late-colonial-indonesia.pdf>.
- Qardawi, Yusuf Al. *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Rahman, Muhammad Aulia. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Intermedia, 2002.
- Rodiyah. "Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Perspektif Socio-Legal." *Masalah-masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 144–152. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4214>.
- Saefullah. *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Salsabila, Nada Rakhima, Nur Syafiqah Hussin, dan Achmad Diny Hidayatullah. "Bank Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan untuk Meningkatkan Ekonomi Umat." *Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 96–114. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/9144>.
- Sertiawan, Nerisa, Ayu Lestari Nasution, dan Ade Chia Syafira. "Konsep Dasar Sistem Sosial Indonesia dan Masyarakat sebagai Suatu Sistem." *Jurnal Faidatuna* 4, no. 2 (2023): 123–134. <https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/ft/article/view/223>.
- Slamet, Achmad Diny Hidayatullah, dan Imam Bani Mustolik. "The Importance of System Transition in The Transfer of State Assets Management to Public Institutions: Analysis at The State Islamic University - Public Service Agency in Indonesia." *IJIRME: International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Education* 3, no. 5 (2024): 743–752. <https://ijirme.com/v3i5/8.php>.
- Statistik. "TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan." *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi*. Last modified 2024. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukarna. *Sistem Politik*. Bandung: Alumni, 1977.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.